

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan globalisasi di dunia telah berdampak pada berbagai sisi kehidupan seperti sosial, politik, budaya dan ekonomi. Salah satu dampak globalisasi dalam bidang ekonomi adalah adanya perdagangan bebas dimana negara-negara di dunia akan menghilangkan hambatan keluar dan masuk, ekspor dan impor. Namun pada kenyataannya, pola perdagangan bebas tidak dijalankan sebebaskan-bebasnya tanpa regulasi, karena pola perdagangan dunia hari ini mengarah pada praktik regionalisasi. Salah satunya adalah *ASEAN Economic Community* (AEC) yang akan dilaksanakan pada tahun 2015.

Dengan diberlakukannya AEC pada akhir 2015, maka akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke masing-masing negara anggota ASEAN. Hal ini merupakan suatu peluang sekaligus tantangan bagi dunia usaha Indonesia. Untuk menghadapi era pasar bebas se-Asia Tenggara itu, dunia usaha di Tanah Air tentu harus mengambil langkah-langkah strategis agar dapat menghadapi persaingan dengan negara ASEAN lainnya, tak terkecuali sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Berbagai langkah-langkah strategispun disusun untuk membantu pelaku KUKM dalam menyongsong era pasar bebas ASEAN tersebut. Adapun langkah-langkah strategis yang telah disusun antara lain peningkatan wawasan pelaku KUKM terhadap AEC,

peningkatan efisiensi produksi dan manajemen usaha, peningkatan daya serap pasar produk KUKM lokal, penciptaan iklim usaha yang kondusif.<sup>1</sup>

Jika langkah-langkah strategis ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh pemerintah, maka KUKM sebagai '*market leader*' di ASEAN akan benar-benar terjadi. Terutama menjadi '*market leader*' di pasar sendiri. hal ini akan cepat terealisasi jika KUKM sendiri juga ikut berperan dalam meningkatkan daya saing dengan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan memiliki spesialisasi keunggulan yang membedakan dengan produk lainnya.

Selain itu, jika Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) mampu menjadi '*market leader*', khususnya Koperasi, maka secara tidak langsung hal ini akan memperbaiki kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia sehingga pembangunan nasional yang selama ini menjadi cita-cita bangsa akan terwujud. Hal ini karena koperasi merupakan lembaga ekonomi yang bersifat sosial, yakni yang berusaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara bersama-sama. Seperti yang disebutkan oleh Prof. Sri-Edi Swasono dalam bukunya, yaitu:

Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi “untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran pemberdayaan diri, namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai upaya pemberdayaan oleh *agent of development*, baik oleh pemerintah, elit masyarakat maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Antara News.com, Kamis 26 Maret 2015, 23:34 wib Kesiapan KUKM Indonesia dalam Menghadapi MEA  
<http://www.antaraneews.com/berita/436319/kesiapan-koperasi-ukm-indonesia-menatap-era-mea-2015>

<sup>2</sup> Sri-Edi Swasono. *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan, Kerakyatan, Nasionalisme dan Kemandirian* (Jakarta: UNJ Press, 2012) h.114

Dalam UUD Pasal 33 Ayat 1 menerangkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam pasal ini yang dimaksud adalah badan koperasi. Sebagaimana dalam penjelasan dari Pasal 33 asli, sebelum diamandemen. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi memiliki perwujudan dari nilai-nilai luhur yang telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia seperti kebersamaan, kekeluargaan dan gotong-royong. Oleh karena itu badan usaha yang sangat sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia adalah koperasi.

Sebagai badan usaha, koperasi juga tidak dilarang untuk mencari keuntungan, Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh sisa hasil usaha (SHU) yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usaha. Dalam menjalankan usahanya koperasi memiliki beberapa macam cabang usaha, yaitu: produksi, simpan-pinjam, dan jasa. Dalam perkembangannya, usaha koperasi di Indonesia yang paling berkembang pesat adalah usaha simpan-pinjam. Selain karena sejarah awal koperasi yang berdiri di Indonesia adalah koperasi yang bergerak dibidang simpan pinjam, usaha simpan pinjam juga memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia yang tingkat konsumsinya tinggi untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Pada dasarnya pemberian pinjaman oleh koperasi memiliki tujuan untuk membantu para anggota dalam memenuhi kebutuhan, diharapkan anggota mampu meningkatkan taraf kehidupannya. Selain memudahkan anggota dalam memenuhi kebutuhannya, pemberian kredit bertujuan untuk mencari keuntungan pada

koperasi melalui pemberian bunga atau jasa kredit yang dibebankan kepada debitur (anggota), dengan adanya keuntungan koperasi maka Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota juga akan bertambah dan hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya persentase keuntungan yang diperoleh oleh setiap anggota dalam koperasi, namun penyaluran kredit juga merupakan resiko bagi suatu koperasi yang tercermin dari kredit non lancar (*non performing loan*) maka dari itu koperasi harus bersikap selektif untuk memilih calon anggota yang benar-benar memenuhi persyaratan koperasi.

Beberapa koperasi yang banyak menyalurkan kreditnya biasanya dipengaruhi oleh banyaknya jumlah anggota, dan koperasi yang banyak memiliki anggota adalah koperasi pegawai atau koperasi karyawan yang berada di Jakarta. Sebagai ibukota negara, Jakarta banyak memiliki kantor administrasi negara seperti sekretariat negara, kementerian, dan kantor administrasi tiap wilayah. Selain itu terdapat juga kantor pelayanan seperti bank, telekomunikasi dan museum. Disisi lain jiwa gotong royong masyarakat Indonesia masih cukup tinggi sehingga disetiap kantor-kantor administrasi seperti tersebut diatas membentuk adanya koperasi yang anggotanya terdiri dari para pegawai atau karyawan yang bekerja di setiap kantor tersebut. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa banyak koperasi pegawai di Jakarta. ini sesuai dengan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan pada 30 Juni 2014 yang menyebutkan bahwa jumlah koperasi pegawai yang aktif mencapai 412 koperasi. Kemudian jumlah anggota yang paling banyak adalah berada di Jakarta Pusat yaitu sejumlah

268.823, sehingga penyaluran kredit di Koperasi Pegawai Jakarta Pusat pada anggota akan dimungkinkan tinggi karena jumlah anggotanya yang banyak.

Ada Enam koperasi pegawai di Jakarta Pusat yang diambil sebagai sampel oleh peneliti yaitu Koperasi Pegawai Bank BTN, Koperasi Pegawai Kementerian Sosial, Koperasi Pegawai Kementerian Agama, Koperasi Pegawai Dirjen Anggaran, Koperasi Pegawai Museum Nasional dan Koperasi Pegawai Setjen DPR. Beberapa koperasi ini dipilih karena koperasi-koperasi ini memiliki data laporan hasil Rapat Akhir Tahunan (RAT) yang lengkap sesuai tahun yang diinginkan oleh peneliti dan diizinkan untuk dipublikasikan. Berikut ini disajikan data penyaluran kredit pada 6 (Enam) Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat dari tahun 2012 sampai tahun 2014.

**Tabel I.1**  
**Penyaluran Kredit pada Enam Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat**

No	Nama Koperasi	2012	2013	2014
1	KPBTN	23,785,796,100	21,337,298,700	14,565,373,000
2	KPKS	9,581,883,000	9,682,000,000	12,664,300,000
3	KPKA	11,811,340,900	15,861,870,900	15,413,682,000
4	KPDA	2,425,500,000	2,828,500,000	3,746,300,200
5	KPMN	297,450,000	175,254,700	104,919,900
6	KPSDPR	23,411,300,000	29,772,050,000	22,537,800,000

Sumber: Laporan Rapat Akhir Tahunan 6 Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat, 2012-2014

Keterangan:

- 1) KPBTN : Koperasi Pegawai Bank BTN
- 2) KPKS : Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI
- 3) KPKA : Koperasi Pegawai Kementerian Agama RI
- 4) KPDA : Koperasi Pegawai Dirjen Anggaran
- 5) KPMN : Koperasi Pegawai Museum Nasional
- 6) KPSDPR : Koperasi Pegawai Setjen DPR RI

Penyaluran kredit pada 6 koperasi tersebut umumnya mengalami penurunan pada tahun 2014 dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali pada Koperasi Pegawai Kementerian Sosial dan Koperasi Pegawai Dirjen Anggaran. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2014 Koperasi Pegawai Kementerian Sosial RI menurunkan bunga pinjaman atau jasa pinjaman koperasi dari 10,2% menjadi sebesar 9,6% sehingga penyaluran kreditpun tinggi. Berbeda dengan Koperasi Pegawai Dirjen Anggaran yang persentase bunga pinjaman yang konstan, anggota koperasi Koperasi Pegawai Dirjen Anggaran lebih tertarik karena bunga pinjaman yang rendah sehingga pengembalian yang disertai bunga tersebut tidak memberatkan anggota. Selain itu Koperasi Pegawai Dirjen Anggaran menerima anggota baru pada tahun 2014 sehingga jumlah anggota koperasi bertambah dari 1990 menjadi 2010 orang.

Suatu koperasi biasanya menerapkan bunga berdasarkan kebijakan yang dihasilkan pada Rapat Akhir Tahunan (RAT) sehingga bunga koperasi cenderung tetap atau menurun. Berbeda dengan bunga bank yang terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran sehingga bunga bank cenderung berfluktuasi. Dalam penyaluran kredit, tingkat suku bunga memiliki peran sebagai harga dari suatu kredit yang akan diambil oleh para anggota, sehingga anggota akan memutuskan untuk mengambil kredit dengan salah satu faktor yaitu tingkat suku bunga.

Berikut ini data suku bunga pinjaman pada Enam Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat.

**Tabel I.2**  
**Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit pada Enam Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat**

No	Nama Koperasi	2012	2013	2014
1	KPBTN	10%	10%	10%
2	KPKS	10,8%	10,2%	9,6%
3	KPKA	18%	18%	18%
4	KPDA	10,8%	10,8%	10,8%
5	KPMN	36%	36%	36%
6	KPSDPR	8,4%	8,4%	8,4%

Sumber: Laporan RAT 6 Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat, 2012-2014

Perkembangan tingkat suku bunga secara umum konstan selama tiga tahun terakhir, hanya pada dua koperasi saja yang menurun. Hal ini diakibatkan tingkat suku bunga koperasi tidak terpengaruh langsung oleh inflasi, berbeda dengan suku bank yang terpengaruh dengan inflasi. Karena suku bunga koperasi ditetapkan pada RAT (Rapat Akhir Tahunan) yang berdasarkan musyawarah mufakat para anggota. Sehingga keputusan yang diambil dalam menentukan besaran suku bunga merupakan keputusan bersama semua anggota. Keputusan bersama ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama para anggota melalui penetapan bunga pinjaman yang terjangkau sehingga anggota akan mudah memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Tingkat suku bunga yang rendah belum tentu membuat penyaluran kredit semakin tinggi. Hal ini dikarenakan kemampuan koperasi dalam menyalurkan kredit juga dipengaruhi oleh hal lainnya, yaitu modal kerja koperasi. Pada Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 dijelaskan bahwa modal kerja koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari Bank umum, Bank Koperasi atau koperasi lainnya. Dengan adanya peningkatan simpanan anggota yang disepakati tiap tahunnya, keuntungan koperasi yang bertambah sehingga cadangan SHU juga akan bertambah. Selain itu pinjaman dari bank ataupun koperasi lain akan mendukung proses kerja koperasi khususnya pada penyaluran kredit koperasi.

Berikut ini disajikan data perkembangan modal kerja pada Enam Koperasi Pegawai yang berada di Jakarta Pusat dari tahun 2012 sampai tahun 2014.

**Tabel I.3**  
**Perkembangan Modal Kerja pada Enam Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat 2012-2014**

No	Nama Koperasi	2012	2013	2014
1	KPBTN	49,795,701,006	47,857,327,800	57,027,034,909
2	KPKS	29,368,082,300	29,084,325,450	35,237,327,000
3	KPKA	17,054,104,000	22,128,512,400	26,673,041,600
4	KPDA	3,553,641,800	4,619,126,200	5,028,117,300
5	KPMN	1,751,847,000	1,751,847,000	1,660,936,000
6	KPSDPR	57,339,909,600	54,203,683,300	51,641,195,300

Sumber: Laporan RAT pada 6 Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat, 2012-2014

Modal kerja pada Enam Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat cenderung berfluktuasi tiap tahunnya, hanya Koperasi Pegawai Kementerian Sosial dan Koperasi Pegawai Dirjen Anggaran yang modal kerjanya tiap tahun bertambah. Permintaan kredit yang cukup tinggi harus diiringi dengan tingginya dana yang dihimpun dari anggota misalnya dalam bentuk peningkatan keuntungan koperasi, simpanan anggota atau dengan modal penyertaan dari pihak ketiga agar koperasi dapat menyalurkan kredit pinjaman dengan lebih lancar.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Tingkat Suku Bunga dan Modal Kerja terhadap Penyaluran Kredit pada Koperasi di Jakarta Pusat”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian di atas terlihat berbagai masalah yang terjadi di koperasi yang mempengaruhi kredit diantaranya :

1. Tingkat Suku bunga pinjaman Koperasi yang konstan menyebabkan penyaluran kredit pada Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat mengalami penurunan.
2. Modal Kerja Koperasi yang fluktuatif menyebabkan penyaluran kredit koperasi berkurang.
3. Jumlah Anggota Koperasi mempengaruhi penyaluran kredit pada Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat.
4. Kredit Macet (*Non Performing Loan*) mempengaruhi penyaluran kredit pada Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi diatas, ada banyak faktor yang mempengaruhi kredit di koeprasi. Dalam penelitian ini hanya membahas pada masalah pengaruh tingkat suku bunga dan modal kerja terhadap penyaluran kredit pada Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat pada tahun 2010 sampai 2014.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pembatasan masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan di kaji melalui penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat suku bunga koperasi berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat?
2. Apakah modal kerja berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada Koperasi Pegawai di Jakarta Pusat?

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Untuk menambah konsep teori yang dapat digunakan dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perkembangan usaha koperasi yaitu mengenai pengaruh tingkat suku bunga dan modal kerja terhadap penyaluran kredit pada koperasi.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Peneliti**

Hasil penelitian dapat berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki peneliti terutama mengenai pengaruh tingkat suku bunga dan modal kerja terhadap penyaluran kredit pada koperasi.

### **b. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan koperasi dalam meningkatkan penyaluran kreditnya.

### **c. Bagi Universitas Negeri Jakarta**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan, acuan dan referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan tugas akhir atau penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan penyaluran kredit.

### **d. Bagi Masyarakat**

Sebagai sumber pengetahuan dan informasi dalam rangka meningkatkan wawasan mengenai pengaruh suku bunga dan modal kerja terhadap penyaluran kredit pada koperasi.